

**PENGARUH PAD DAN DAU TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA DENGAN
BELANJA PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2021)**

Risya Aulia¹

Imelda Sari²

^{1,2}(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi)

¹risyaaulia6@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of regional own-source revenue and general allocation funds on local government financial performance with personnel expenditure as an intervening variable in district and city governments in Bangka Belitung province. The sample was determined using saturated sampling, with a total of 6 districts and 1 city so that the total observations of this study were 35 observations. The analytical method used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis, and Sobel test. Testing the hypothesis used the t test with the Eviews Software test tool version 12. The conclusion in this research is partially, local revenue has a significant negative effect on personnel spending. While general allocation funds have no effect on personnel spending. Furthermore, partially local revenue has a significant negative effect on local government financial performance. Partially, general allocation funds have a significant negative effect on local government financial performance and partially personnel spending has a significant positive effect on local government financial performance. Regional original income has a significant negative effect on local government financial performance through personnel spending. General allocation funds have no effect on local government financial performance through personnel spending.

Keywords: *General Allocation Fund, Local Own Revenue, Personnel Expenditures, Regional Government Financial Performance*

I. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari pengelolaan keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan melihat nilai anggaran pada APBD dan nilai realisasi pada APBD. Setiap daerah memiliki kinerja keuangan yang berbeda tergantung pada pengelolaan keuangan daerahnya seperti halnya pada pemerintah kabupaten dan kota di

Provinsi Bangka Belitung. Pelaksanaan otonomi daerah ini merupakan kesempatan entitas lokal yang ada di daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung.

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai pelaksanaan otonomi daerah dilihat pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka, kendala pada pelaksanaan otonomi daerah sering terjadi pada pengelolaan keuangan daerah. Setiap daerah memiliki kendala yang bervariasi dalam mengatur kinerja keuangannya. Masalah yang kerap terjadi pada kemerosotan kinerja keuangan adalah pos pengeluaran belanja daerah diketahui lebih dominan digunakan untuk belanja pegawai dan sistem pengeluaran belanja daerah yang kurang optimal. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pada tahun 2020 Bangka Belitung menjadi salah satu provinsi dengan belanja pegawai tertinggi mencapai 36% yang artinya sangat melebihi rata-rata penggunaan belanja pegawai pada tingkat provinsi sebesar 27%. APBD yang digunakan oleh Provinsi Bangka Belitung sebagian besar hanya untuk belanja pegawai.

Hal ini dikarenakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik tidak akan terlepas dari kinerja para perangkat pemerintah daerah, maka adanya belanja pegawai pada pengeluaran belanja daerah merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kerjanya, sehingga terjadinya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan PAD yang tinggi yang mengindikasikan adanya kemandirian daerah dalam mengatur kualitas anggaran dan mengelola potensi daerah yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Prasetyo (2014) PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai dan Putri (2019) bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga banyak terserap pada pos anggaran belanja pegawai yang menjadi salah satu hal kendala daerah dalam mengoptimalkan otonomi daerah. Selain itu, fenomena pemekaran daerah juga membengkakkan anggaran belanja daerah terutama pada alokasi belanja pegawai yang berasal dari DAU. Ketidakefektifan dalam pemanfaatan DAU serta tidak mementingkan hasil dan dampak dari DAU yang seharusnya belanja modal lebih besar digunakan untuk kepentingan publik dibandingkan belanja pegawai mengimplikasi pada tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah yang menurun. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Prasetyo (2014) bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai dan menurut Sari dan Halmawati (2021) menyimpulkan

hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja pegawai. Kemudian, apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, belanja pegawai akan berperan sebagai variabel *intervening* sehingga akan menguji apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja pegawai. Manfaat dalam penelitian ini bagi Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sehingga masyarakat dapat aktif untuk mengetahui informasi kinerja dari pemerintah setempat.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Nordiawan (2012: 4) akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

2.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Apabila PAD memiliki nilai yang tinggi maka tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat semakin rendah. Pengelolaan PAD yang baik tidak akan terlepas dari kinerja para perangkat pemerintah daerah, maka adanya belanja pegawai pada pengeluaran belanja daerah merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kerjanya. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Akbar *et al.* (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap pengalokasian belanja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD

berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. Selain itu, penelitian Prasetyo (2014) juga menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pegawai.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Pegawai

2.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

DAU dan belanja pegawai memiliki keterkaitan yang sangat erat yang mana dalam pelaksanaannya, belanja pegawai yang diperoleh dari hasil DAU menyerap lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah lainnya. Dengan kata lain, jika DAU meningkat maka pengalokasikan belanja pegawai juga meningkat. Prasetyo (2014) meneliti hubungan antara pengaruh DAU terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Pegawai

2.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Porsi PAD yang tinggi mengindikasikan adanya kemandirian daerah dalam mengatur kualitas anggaran dan mengelola potensi daerah yang ada sehingga terjadinya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Putri (2019) meneliti hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian Mulyani dan Wibowo (2017) menyimpulkan hasil bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Alokasi DAU dapat mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah sehingga pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat dapat berjalan secara optimal. Dapat dikatakan jika DAU meningkat maka kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga semakin baik. Sari dan Halmawati

(2021) melakukan pengujian pada pengaruh antara DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Wiguna (2015) juga menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₄: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.6. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengeluaran belanja pegawai merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dalam efektivitas kerjanya. Namun, dalam pelaksanaannya realisasi belanja pegawai dapat terserap lebih banyak dibandingkan belanja daerah lainnya sehingga memengaruhi penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian Putri (2019) melakukan pengujian mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyimpulkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₅: Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.7. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

Pengelolaan PAD yang baik tidak akan terlepas dari kinerja para perangkat pemerintah daerah, maka adanya belanja pegawai pada pengeluaran belanja daerah merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada perangkat pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kerjanya. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka akan meningkatkan alokasi belanja pegawai yang harapannya akan memengaruhi peningkatan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Akbar *et al.* (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD terhadap pengalokasian belanja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Selain itu, Prasetyo (2014) juga menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pegawai. Pada penelitian Putri (2019) melakukan pengujian mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyimpulkan hasil

bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₆: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

2.8. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

DAU dan belanja pegawai memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sering kali dalam pelaksanaannya, belanja pegawai yang diperoleh dari hasil DAU menyerap lebih besar dibandingkan dengan belanja daerah lainnya. Dengan kata lain, jika DAU meningkat maka pengalokasikan belanja pegawai juga meningkat. Dapat diketahui bahwa ketidakefektifan mengelola DAU dalam mengalokasikan ke belanja pegawai ini menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Menurut Prasetyo (2014) meneliti hubungan antara pengaruh DAU terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Menurut Putri (2019) yang melakukan pengujian mengenai pengaruh belanja pegawai terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyimpulkan hasil bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₇: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung periode 2017-2021 yang mana Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah jenuh sampling dengan sampel 7 daerah yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota, maka jumlah sampel keseluruhan adalah 5 tahun x 7 daerah = 35 observasi.

Tabel 1
Daftar Populasi dan Sampel di Provinsi Bangka Belitung

No.	Daerah
1	Kota Pangkalpinang
2	Kabupaten Bangka
3	Kabupaten Bangka Tengah
4	Kabupaten Bangka Selatan
5	Kabupaten Bangka Barat
6	Kabupaten Belitung
7	Kabupaten Belitung Timur

Sumber: www.babel.bpk.go.id, 2022

Pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dan data diperoleh dari situs www.bpk.go.id yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdapat pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung. Objek pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang pengukurannya menggunakan skala rasio efisiensi keuangan daerah yang dirumuskan dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Deskriptif

(dalam ribuan Rupiah)

	PAD	DAU	BP	KKPD
Mean	1.191.519.757.712	4.580.416.093.219	3.719.249.436.691	0,93
Median	109.657.374	445.168.706	381.924.681	0,94
Maximum	196.070.487	552.780.809	474.496.215	1,10
Minimum	49.427.844	415.532.093	258.363.507	0,81
Std. Dev.	4.810.135.206.777	3.442.101.244.896	5.686.628.981.566	0,07
Observations	35	35	35	35

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik

No.	Jenis Uji Asumsi Klasik	Kriteria	Hasil		Keputusan
			Model 1	Model 2	
1	Uji Normalitas	Prob > 0,05	0,848	0,654	Data terdistribusi normal
2	Uji Autokorelasi	dU) < DW < (4-dU)	1,911	1,973	Tidak terjadi autokorelasi
3	Uji Multikolinearitas	VIF < 10	1,301323	1,465207	Tidak terjadi multikolinearitas
			1,301323	1,427197	
				1,427984	
4	Uji Heteroskedastisitas	Prob > 0,05	0,6074	0,2276	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2023

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 1

<i>Dependent Variable: BP</i>		
<i>Method: Panel Least Squares</i>		
<i>Sample: 2017 2021</i>		
<i>Periods included: 5</i>		
<i>Cross-sections included: 7</i>		
<i>Total panel (balanced) observations: 35</i>		
Variabel	Koefisien	Std. Error
C	3.89E+11	1.65E+11
PAD	-1,426508	0,557469
DAU	0,334188	0,340469

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 2

<i>Dependent Variable: KKPD</i>		
<i>Method: Panel Least Squares</i>		
<i>Sample: 2017 2021</i>		
<i>Periods included: 5</i>		
<i>Cross-sections included: 7</i>		
<i>Total panel (balanced) observations: 35</i>		
Variabel	Koefisien	Std. Error
C	1,124574	0,110055
PAD	-4,11E-13	1,95E-13
DAU	-1,13E-12	2,68E-13
BP	1,00E-12	1,63E-13

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Hipotesis

Uji Parsial (uji t)

Tabel 6
Hasil Uji t Model 1

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	2,362541	0,0259
PAD (X ₁)	-2,558901	0,0167
DAU (X ₂)	0,981552	0,3354

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 7
Hasil Uji t Model 2

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	10,21828	0,0000
PAD (X ₁)	-2,114224	0,0426
DAU (X ₂)	-4,195815	0,0002
BP (Z)	6,163911	0,0000

Sumber: Data diolah, 2023

Uji Sobel

Hasil Uji Sobel Pengaruh PAD dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

$$\begin{aligned}
 Sab &= \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \\
 &= \sqrt{(1001,794^2 \times 0,557^2) + (1,427^2 \times 162,526^2) + (0,557^2 \times 162,526^2)} \\
 &= \sqrt{(1004,104 \times 0,311) + (2,035 \times 26414,63) + (0,331 \times 26414,63)} \\
 &= \sqrt{(311887,96) + (53751,76) + (8208,92)} \\
 &= \sqrt{373848,64} = 611,43 \\
 t &= \frac{ab}{Sab} = \frac{-1,427 \times 1001,794}{611,43} = \frac{-1429,067}{611,43} = -2,34
 \end{aligned}$$

Hasil Uji Sobel Pengaruh DAU dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

$$\begin{aligned}
 Sab &= \sqrt{b^2Sa^2 + a^2Sb^2 + Sa^2Sb^2} \\
 &= \sqrt{(1001,794^2 \times 0,341^2) + (0,334^2 \times 162,526^2) + (0,341^2 \times 162,526^2)} \\
 &= \sqrt{(1004,104 \times 0,116) + (0,112 \times 26414,63) + (0,116 \times 26414,63)} \\
 &= \sqrt{(116335,266) + (2950,02) + (3061,95)} \\
 &= \sqrt{122347,24} = 349,78 \\
 t &= \frac{ab}{Sab} = \frac{0,334 \times 1001,794}{349,78} = \frac{334,79}{349,78} = 0,96
 \end{aligned}$$

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai dengan memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar -1,43. Pada hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,558901 lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,0167 lebih kecil dari α pada taraf nyata 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh

negatif signifikan secara parsial terhadap Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan apabila pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung meningkat maka belanja pegawai akan menurun.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) yang meneliti di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2008-2012 menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja pegawai dan penelitian yang dilakukan Akbar *et al.* (2016) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun pada tahun 2011-2014 menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja pegawai dengan memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0,33. Pada hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,981552 lebih kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,3354 lebih besar dari α pada taraf nyata 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak artinya Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Pegawai. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum adalah sumber penerimaan daerah diperoleh dari pusat yang mempunyai sifat *block grant* dalam aturan pengalokasiannya disesuaikan berdasarkan prioritas daerah tersebut dan cakupan besaran alokasinya tidak begitu tinggi sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam anggaran belanja pegawai.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prasetyo (2014) yang meneliti di Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada tahun 2008-2012 yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Akbar *et al.* (2016) yang meneliti di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun pada tahun 2011-2014 menunjukkan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki

nilai koefisien regresi yang negatif sebesar $-4,12$. Pada hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t -hitung sebesar $2,114224$ lebih besar dari t -tabel dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar $0,0426$ lebih kecil dari α pada taraf nyata $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil ini menunjukkan apabila pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung meningkat maka rasio efisiensi yang dihasilkan pada kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun. Hal tersebut akan mengindikasikan bahwa rasio efisiensi yang menurun maka kinerja keuangan pemerintah daerah tergolong kategori yang efisien. Begitu pula sebaliknya jika pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung menurun maka rasio efisiensi yang dihasilkan pada kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat. Hal tersebut akan mengindikasikan bahwa rasio efisiensi yang meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah tergolong kategori yang tidak efisien. Komponen pada realisasi penerimaan salah satunya merupakan PAD maka dapat dikatakan bahwa PAD mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017) yang meneliti di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-2015 menyimpulkan hasil penelitian bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai koefisien regresi yang negatif sebesar $-1,13$. Pada hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t -hitung sebesar $4,195815$ lebih besar dari t -tabel dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar $0,0002$ lebih kecil dari α pada taraf nyata $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan apabila dana alokasi umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung meningkat maka rasio efisiensi yang dihasilkan pada kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.

Rasio efisiensi yang semakin rendah mengidentifikasi kinerja keuangan yang efisien. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi DAU yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah akan semakin berupaya melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat karena diawasi oleh Pemerintah Pusat sehingga kinerja keuangan akan meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari dan Halmawati (2021) yang melakukan pengujian di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2018 menunjukkan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 1,00. Pada hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 6,163911 lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi atau probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari α pada taraf nyata 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_5 diterima artinya Belanja Pegawai berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan apabila belanja pegawai yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung meningkat maka rasio efisiensi yang dihasilkan pada kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja keuangan yang tidak efisien. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi alokasi belanja pegawai maka menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan alokasi belanja pegawai yang seharusnya dianggarkan dalam APBD agar kinerja keuangan dapat terealisasi secara efisien.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri (2019) yang melakukan pengujian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017 yang menyimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil uji sobel pada pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar -2,34 lebih besar dari t-tabel yaitu 2,04 dengan arah

negatif. Hal ini menjelaskan koefisien mediasi sebesar $-2,34$ yang berarti belanja pegawai mempunyai pengaruh signifikan dalam memediasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_6 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan apabila PAD meningkat dapat memberikan pengaruh pada menurunnya rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja pegawai. Dapat diasumsikan jika PAD meningkat kinerja keuangan akan meningkat secara efisien melalui belanja pegawai sebagai variabel intervening. Porsi PAD yang mengalami peningkatan ini akan memengaruhi meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan rasio efisiensi keuangan daerah yang semakin menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tinggi atau rendahnya PAD dapat dipengaruhi secara tidak langsung oleh alokasi belanja pegawai sehingga akan memengaruhi skala rasio kinerja keuangan pemerintah daerah juga.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil uji sobel pada dana alokasi umum menunjukkan bahwa nilai t -hitung sebesar $0,96$ lebih kecil dari t -tabel yaitu $2,04$ dengan arah positif. Hal ini menjelaskan pada koefisien mediasi sebesar $0,96$ belanja pegawai tidak mampu dalam memediasi hubungan antara dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Belanja Pegawai.

Hal ini dikarenakan pada realisasi belanja pegawai yang berfluktuatif cenderung meningkat dalam kurun waktu 2017-2021 tidak memengaruhi penerimaan DAU karena alokasi DAU tidak memerhatikan jumlah pegawai yang ada maka peningkatan jumlah pegawai dari tahun ke tahun di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung tidak memberikan dampak yang signifikan pada DAU. Hal ini menunjukkan apabila DAU semakin tinggi ataupun rendah, belum tentu memengaruhi peningkatan ataupun penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja pegawai yang meningkat atau menurun pula. Hal tersebut dikarenakan penggunaan DAU tidak dialokasikan untuk belanja pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun dialokasikan untuk keperluan belanja lain, misalnya belanja modal.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja pegawai. Selanjutnya, secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, dana alokasi umum berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan secara parsial belanja pegawai berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja pegawai. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui belanja pegawai.

Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada pembatasan rasio yang digunakan pada kinerja keuangan pemerintah daerah hanya menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah rasio lain disebabkan indikator pengukuran yang digunakan berbeda maka bisa menghasilkan *output* yang berbeda pula sebagai pengaruh terhadap sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang memiliki sensitifitas yang berbeda-beda terhadap faktor uji, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., Indriyani, H., & Fransisca, S. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai. *Jurnal Ilmiah MbiA*, 15 (2), ISSN: 1411-1616. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/11121>
- Kabupaten dan Kota Provinsi Bangka Belitung. Diakses pada tanggal 24 Desember 2022, dari www.babel.bpk.go.id.
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, dari www.bpk.go.id.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-

- 2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15 (1). <http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v15i1.1379>
- Nordiawan, D., Putra, I.S., & Rahmawati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prasetyo, A. H., & Harto, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/44774>
- Putri Marwati, R. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai Dan Penyertaan Modal Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), Jakarta. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5628>
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111750/permendagri-no-64-tahun-2013>
- Wiguna, K. Y. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Fordema*, 12 (1): 38-50. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/291>